

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan temuan, pembahasan, dan hasil penelitian yang telah Peneliti teliti terkait dengan Konflik Sosial Pembangunan Rumah Ibadah HKI Bandung Selatan di Baleendah, Peneliti menarik beberapa kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

##### **5.1.1 Simpulan Umum**

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial yang terjadi dalam pembangunan Gereja HKI Bandung Selatan menunjukkan dinamika yang kompleks antara pihak gereja, masyarakat, dan pemerintah lokal. Konflik ini dipicu oleh ketidakpastian legalitas bangunan gereja dan kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai dampak sosial dan keamanan, termasuk ketakutan terhadap kristenisasi dan perubahan sosial yang disebabkan oleh hadirnya rumah ibadah tersebut. Meskipun demikian, hubungan antarwarga masih tetap terjaga dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada kecanggungan yang muncul akibat ketegangan yang terkait dengan perizinan gereja. Upaya penyelesaian yang dilakukan, seperti negosiasi, diskusi, mediasi, dan peran pemerintah lokal, telah dilakukan, tetapi sering kali tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pemerintah lokal, meskipun berusaha menjaga komunikasi, terlihat kurang dapat berperan efektif sebagai penengah, sebagian besar karena takut akan tekanan dari oknum tertentu. Dalam hal ini, langkah preventif yang perlu diambil adalah menjaga hubungan harmonis antara pihak gereja dan masyarakat, mentaati prosedur perizinan yang berlaku, serta mengkaji ulang peraturan SKB 2 Menteri untuk memberikan kejelasan hukum dan mencegah ketidakpastian. Upaya lebih lanjut dalam mediasi dan pembinaan sosial yang inklusif, serta promosi nilai toleransi antar umat beragama, juga harus ditingkatkan untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam masyarakat yang majemuk. Seiring dengan ini, penting untuk mengingat bahwa keberagaman agama harus dihargai sebagai bagian dari hak asasi manusia dan menciptakan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan keyakinannya tanpa menimbulkan ketegangan atau konflik sosial.

### 5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan uraian pada BAB sebelumnya, yakni pada temuan dan pembahasan penelitian, maka akan dirumuskan simpulan khusus yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya konflik sosial dalam pembangunan Gereja HKI Bandung Selatan dapat ditelusuri dari beberapa faktor utama. Pertama, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan perizinan yang belum diurus dengan baik oleh pihak gereja menyebabkan keraguan di kalangan warga mengenai legalitas gereja tersebut. Kedua, adanya perbedaan pandangan antara pihak gereja dan sebagian masyarakat mengenai keberadaan rumah ibadah yang menimbulkan ketakutan akan penyebaran agama dan kristenisasi. Ketiga, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini, yang semakin diperparah dengan ketakutan terhadap ancaman dari oknum tertentu. Konflik ini juga dipicu oleh perbedaan sikap antara warga yang eksklusif dalam memandang agama dan mereka yang lebih inklusif, yang menambah ketegangan sosial di tingkat masyarakat.
2. Dampak yang ditimbulkan dari konflik sosial pembangunan Gereja HKI Bandung Selatan mencakup berbagai aspek baik bagi pihak gereja maupun masyarakat. Bagi pihak gereja, dampaknya sangat terasa pada aspek operasional, seperti kesulitan dalam mencari tempat ibadah yang layak, harus menyewa gedung dengan jarak yang jauh dari lokasi semula, serta hambatan dalam proses pendidikan agama bagi anak-anak jemaat. Selain itu, bagi masyarakat, dampak utama yang dirasakan adalah ketidakpastian terkait legalitas gereja dan kekhawatiran terhadap potensi ancaman dari pihak luar yang terkait dengan pembangunan gereja. Meskipun demikian, hubungan sehari-hari antar warga dan gereja tidak banyak terganggu, karena mereka tetap menjaga komunikasi yang baik meskipun ada rasa ketegangan dalam isu pembangunan gereja.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk meredakan konflik sosial pembangunan Gereja HKI Bandung Selatan melibatkan berbagai pendekatan, namun belum sepenuhnya berhasil mencapai kesepakatan yang memadai. Pihak gereja mencoba melakukan negosiasi dengan menemui

ketua forum yang membubarkan peribadatan dan memohon agar diberikan izin untuk melanjutkan ibadah, namun upaya ini tidak membuahkan hasil yang signifikan, kecuali diberikan izin beribadah hingga bulan Desember 2012. Selain itu, upaya diskusi bersama antara pihak gereja dan masyarakat juga tidak membuahkan solusi yang memadai, bahkan menyebabkan bentrok dan ketegangan antara kedua belah pihak, dengan aspirasi gereja tidak mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat. Dalam upaya mediasi, meskipun pihak gereja dan pemerintah lokal sudah melakukan pertemuan dengan camat, jajaran kepala daerah, dan kepolisian, hasilnya malah melegalkan penutupan gereja tersebut, yang semakin memperburuk kondisi. Pemerintah lokal, meskipun terjalin hubungan baik dengan gereja dan RT/RW, tidak mampu bertindak sebagai penengah yang efektif dalam konflik ini, karena terhambat oleh ketakutan terhadap oknum tertentu yang mempengaruhi proses penyelesaian konflik. Secara keseluruhan, meskipun ada berbagai upaya yang dilakukan, seperti mediasi, diskusi, dan negosiasi, konflik ini belum terselesaikan dengan memadai, dan penyelesaian yang efektif masih belum tercapai karena berbagai hambatan yang ada, baik dari sisi administratif, sosial, maupun ketakutan terhadap potensi dampak luar.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Peneliti, maka terdapat implikasi yang dapat diberikan kepada pihak – pihak yang terkait dengan Konflik Sosial Pembangunan Rumah Ibadah HKI Bandung Selatan di Baleendah yaitu sebagai berikut:

### **5.2.1 Bagi Gereja HKI Bandung Selatan**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan Pihak gereja HKI Bandung Selatan memahami pentingnya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi perizinan pembangunan rumah ibadah, serta memperkuat komunikasi dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Pihak gereja perlu lebih proaktif dalam melakukan pendekatan yang transparan dan mengedepankan dialog konstruktif dengan warga serta pemerintah lokal, untuk menghindari kesalahpahaman dan menciptakan suasana yang lebih harmonis.

Selain itu, gereja perlu mempertimbangkan upaya preventif, seperti pengkajian

Jesy Martha Aprillia Panjaitan, 2025

*ANALISIS KONFLIK SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH GEREJA HKI BANDUNG SELATAN DI BALEENDAH*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ulang terhadap regulasi yang ada, agar dapat mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.

### **5.2.2 Masyarakat Umum**

Penelitian ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat umum mengenai keragaman agama dan budaya di sekitar kita. Masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka terhadap keberagaman, serta mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis melalui dialog yang konstruktif. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya partisipasi aktif dalam proses perizinan dan penyelesaian konflik sosial agar dapat menghindari potensi ketegangan dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

### **5.2.3 Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi sumbangsih materi pembelajaran mengenai pentingnya pengembangan pemahaman mendalam tentang dinamika konflik sosial dalam konteks keberagaman agama dan budaya. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengajaran teori-teori konflik, terutama yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf, dan penerapannya dalam studi kasus nyata. Hal ini juga mendorong mahasiswa untuk lebih kritis dalam menganalisis permasalahan sosial di masyarakat, serta memperkuat keterampilan dalam mencari solusi yang berbasis pada prinsip musyawarah dan mufakat. Program Studi Pendidikan Sosiologi memiliki peran strategis dalam menganalisis dan memberikan solusi terhadap berbagai konflik sosial, termasuk konflik dalam pembangunan rumah ibadah seperti yang terjadi pada Gereja HKI Bandung Selatan di Baleendah. Oleh karena itu, program studi ini disarankan untuk mengintegrasikan kajian konflik sosial berbasis agama ke dalam kurikulum, agar mahasiswa dapat memahami dinamika konflik serta strategi resolusinya secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian-penelitian mengenai konflik sosial berbasis agama perlu lebih diperbanyak, terutama dalam konteks kebijakan publik dan interaksi sosial di masyarakat multikultural.

### **5.2.4 Bagi Pemerintah**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi salah satu referensi dalam memahami pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap

dinamika sosial dalam masyarakat, terutama dalam hal perizinan dan pembangunan rumah ibadah. Penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih baik dalam mediasi konflik sosial, dengan melibatkan semua pihak secara adil, serta memastikan bahwa regulasi seperti SKB 2 Menteri diterapkan secara konsisten untuk menghindari ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Pemerintah diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memfasilitasi dialog yang konstruktif guna mencegah konflik serupa di masa depan.

#### **5.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini masih perlunya eksplorasi lebih lanjut mengenai dinamika konflik sosial terkait pembangunan rumah ibadah di berbagai daerah, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi proses mediasi dan penyelesaian konflik. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam tentang peran pemerintah lokal, serta bagaimana kebijakan terkait perizinan rumah ibadah dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultural setempat. Selain itu, penting untuk memperhatikan perspektif masyarakat yang terlibat agar solusi yang dihasilkan lebih inklusif dan mengakomodasi kebutuhan semua pihak.

### **5.3 Rekomendasi**

Berdasarkan temuan, pembahasan, dan hasil penelitian yang Peneliti peroleh, dimana Peneliti mencoba memberikan rekomendasi bagi pihak – pihak yang berkaitan dengan Konflik Sosial Pembangunan Rumah Ibadah HKI Bandung Selatan di Baleendah, yakni sebagai berikut:

#### **5.3.1 Bagi Pihak Gereja HKI Bandung Selatan**

Rekomendasi yang dapat Peneliti berikan bagi pihak Gereja HKI Bandung Selatan adalah untuk lebih aktif dalam membangun komunikasi dan kerja sama yang lebih intens dengan masyarakat sekitar, terutama terkait dengan proses perizinan pembangunan rumah ibadah. Gereja disarankan untuk mematuhi prosedur administratif yang berlaku dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan pembangunan. Selain itu, penting untuk terus menjaga hubungan yang harmonis dengan warga melalui kegiatan sosial yang melibatkan kedua belah pihak, guna menciptakan rasa saling pengertian dan mengurangi ketegangan yang ada. Selain itu juga, Gereja dapat mengadakan sosialisasi secara rutin kepada warga

Baleendah, menjelaskan visi, misi, dan manfaat sosial yang akan diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan dari kehadiran gereja tersebut. Selain itu, melibatkan tokoh agama dan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan, akan membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap gereja tersebut. Gereja juga disarankan untuk menyusun program-program sosial yang melibatkan semua pihak, seperti penyelenggaraan kegiatan keagamaan lintas agama atau bantuan sosial untuk masyarakat sekitar, guna membangun solidaritas dan mengurangi potensi konflik. Dengan cara ini, Gereja HKI Bandung Selatan dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dengan masyarakat sekitar, serta menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kebersamaan dan toleransi.

### **5.3.2 Bagi Pemerintah**

Rekomendasi yang dapat Peneliti berikan bagi pemerintah adalah diharapkan Pemerintah memiliki peran krusial dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial terkait pembangunan rumah ibadah, termasuk dalam kasus Gereja HKI Bandung Selatan di Baleendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan implementasi yang konsisten dalam perizinan rumah ibadah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat memicu konflik di masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa aturan seperti SKB 2 Menteri diterapkan secara adil dan tidak menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk menghambat hak beribadah. Selain itu, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam membangun komunikasi dengan semua pihak terkait, baik warga, tokoh agama, maupun pihak gereja, guna menciptakan pemahaman bersama dan mengurangi prasangka yang dapat memperburuk konflik. Pemerintah juga perlu memperkuat peran mediasi dalam penyelesaian konflik keagamaan dengan melibatkan lembaga independen yang netral dan memiliki kompetensi dalam resolusi konflik. Selain itu, program edukasi tentang toleransi dan keberagaman harus lebih diperkuat dalam masyarakat untuk mengurangi sikap eksklusif yang dapat memicu konflik sosial di masa depan. Terakhir, aparat keamanan dan penegak hukum harus bertindak tegas terhadap segala bentuk intoleransi dan persekusi terhadap kelompok agama tertentu, sehingga setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang setara dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya.

### **5.3.3 Bagi Masyarakat Umum**

Rekomendasi yang dapat Peneliti sarankan kepada masyarakat umum adalah Masyarakat umum memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik berbasis agama, termasuk dalam kasus pembangunan Gereja HKI Bandung Selatan di Baleendah. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat harus mengedepankan dialog yang terbuka dan konstruktif dalam menyikapi perbedaan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi yang dapat memperkeruh situasi. Selain itu, pemahaman tentang kebebasan beragama sebagai hak konstitusional harus diperkuat, sehingga tidak ada kelompok yang merasa superior dan berhak menghalangi ibadah kelompok lain. Partisipasi aktif dalam kegiatan sosial lintas agama juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mempererat hubungan dan mengurangi prasangka. Jika terjadi ketidaksepahaman, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikannya melalui jalur musyawarah dan mediasi, bukan dengan tindakan represif yang dapat memperburuk konflik. Dengan membangun budaya toleransi dan kebersamaan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang damai dan inklusif bagi semua pihak, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang agama atau kepercayaan.

### **5.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya**

Bagi Peneliti selanjutnya, rekomendasi yang dapat peneliti sarankan adalah untuk menggali lebih dalam mengenai peran dan strategi pemerintah lokal dalam mediasi konflik sosial terkait pembangunan rumah ibadah. Peneliti juga disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan lain dalam penyelesaian konflik, seperti penguatan peran tokoh masyarakat atau agama, serta dampak jangka panjang dari konflik semacam ini terhadap keharmonisan sosial. Penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan aspek lain seperti peran media dalam membentuk opini publik mengenai isu pembangunan rumah ibadah.